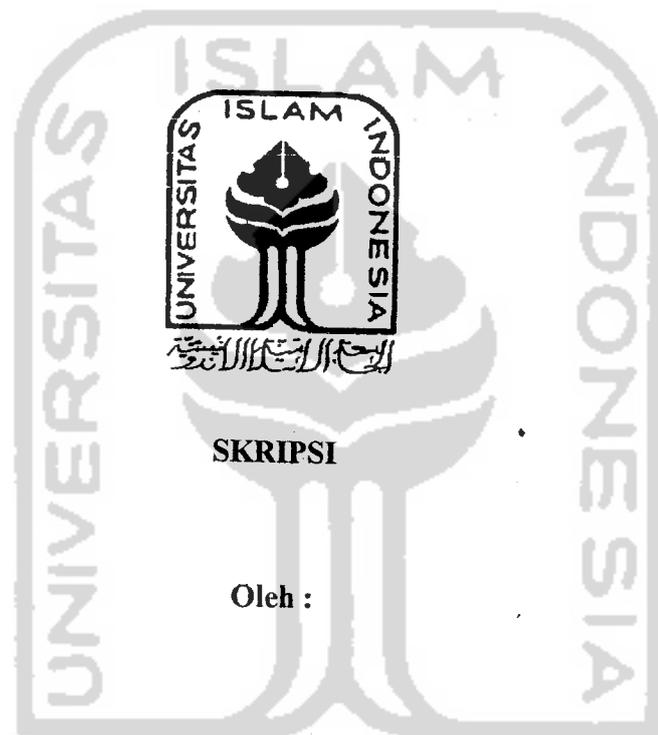


**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi)**



Oleh :

Nama : Arif Perdananto

Nomor Mahasiswa : 03.312.327

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Arif Perdananto

Nomor Mahasiswa : 03.312.327

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, Mei 2007

Penyusun,

(Arif Perdananto)

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten /Kota di Sulawesi)**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 16 Mei 2007

Dosen Pembimbing,

all siap y diinj kaa

(Drs. Kesit Bambang Prakosa, M. Si.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat dan para pengikutnya. Tak ada kata yang lebih pantas dari pada pujian dan ungkapan rasa syukur kepada-Nya karena hanya atas kehendak-Nya saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi)". Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat selama masa perkuliahan :

1. Bapak Drs. Asma'i Ishak, M.Bus.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu. Dra. Erna Hidayah, M.Si, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai asisten beliau.
5. Bapak dan Ibu Dosen FE UII yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Ibuk dan Bapak yang selalu memberikan semangat, doa, dan kebebasan kepada diriku untuk menentukan langkah dan Adiq yang menjadi motivasi seorang Arif untuk menjadi kakak yang Arif.
7. Mbok Jah-Q, terima kasih atas kebaikan, perhatian, bantuan, dan kesabarannya selama ini.
8. Agung, Indro, Winda, Joel, Agung STAN, M3 & Wife, Om Tri, Lupi, Bos Gori, Yaksa's Family, terima kasih atas warna-warni yang telah kalian berikan. Sukses buat kita semua.
9. Teman-teman seperjuangan di KOMISI, anak akuntansi klas E 2003, Duke FC, M4 Temanggung, temen-temen di Temanggung, bola basket, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
10. Semua orang yang saya kenal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Thank's for all.

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang saya miliki, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Penulis

(Arif Perdananto)

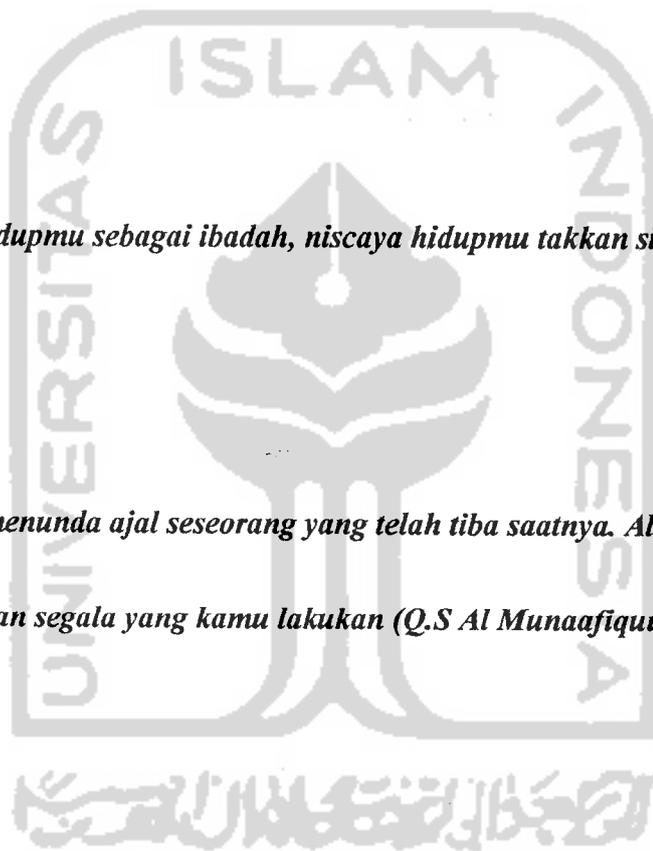
MOTTO

“Jadi orang penting itu baik tapi lebih penting jadi orang baik”

“Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah, niscaya hidupmu takkan sia-sia”

Allah tidak bakal menunda ajal seseorang yang telah tiba saatnya. Allah Maha

Mengetahui akan segala yang kamu lakukan (Q.S Al Munaafiquun 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- * *Keluargaku tercinta Bapak, Ibuk, dan Adikq yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan tak ternilai.*
- * *Mbok Jah-Q, yang selalu mencurahkan perhatian, kebaikan, dan bantuanya.*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiatisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Motto.....	ix
Halaman Persembahan	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.1 Pajak Daerah	9
2.1.2 Retribusi Daerah	10
2.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah	11
2.1.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah	12
2.2 Dana Alokasi Umum	12
2.3 Belanja Daerah	14
2.3.1 Belanja Rutin	16
2.3.2 Belanja Pembangunan	16
2.4 Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis.....	16
2.4.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah	18
2.4.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daera	19
2.4.3 <i>Flypaper Effect</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Populasi dan Sampel	23
3.2 Data dan Sumber Data	23
3.3 Variabel Penelitian	24
3.3.1 Pendapatan Asli Daerah	24
3.3.2 Dana Alokasi Umum	24
3.3.3 Belanja Daerah	25
3.4 Alat Analisis	26

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Analisis Deskriptif	28
4.2 Analisis Statistik.....	29
4.2.1 Analisis Pengaruh PAD _t dan DAU _t terhadap BD _t	29
4.2.2 Analisis Pengaruh PAD _{t-1} dan DAU _{t-1} terhadap BD _t	34
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	39
4.3.1 Pembahasan Hipotesis Pertama	39
4.3.2 Pembahasan Hipotesis Kedua	40
4.3.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga	41
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Keterbatasan Penelitian	44
5.3 Saran	45
 DAFTAR PUSTAKA	 47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	28
Tabel 4.2 Regresi Sederhana Pengaruh PAD_t dan DAU_t terhadap BD_t	30
Tabel 4.3 Regresi Berganda Pengaruh PAD_t dan DAU_t terhadap BD_t	32
Tabel 4.4 Analisis Faktor Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD_t	33
Tabel 4.5 Regresi Sederhana Pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap BD_t ..	35
Tabel 4.6 Regresi Berganda Pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap BD_t	37
Tabel 4.7 Analisis Faktor Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD_t	38



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi Tahun Anggaran 2002-2005.....	49
---	----

LAMPIRAN 2

Ringkasan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi Tahun Anggaran 2002-2005.....	51
--	----

LAMPIRAN 3

Ringkasan Realisasi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi Tahun Anggaran 2002-2005.....	53
--	----

LAMPIRAN 4

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh PAD_t Terhadap BD_t	55
---	----

LAMPIRAN 5

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh DAU_t Terhadap BD_t	56
---	----

LAMPIRAN 6

Analisis Regresi Berganda Pengaruh PAD_t dan DAU_t Terhadap BD_t	57
--	----

LAMPIRAN 7

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh PAD_{t-1} Terhadap BD_t	58
---	----

LAMPIRAN 8

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh DAU_{t-1} Terhadap BD_t	59
---	----

LAMPIRAN 9

Analisis Regresi Berganda Pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} Terhadap BD_t	60
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Sampel yang digunakan adalah relisasi anggaran dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sulawesi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU baik secara terpisah maupun serentak dan baik dengan lag ataupun tanpa lag mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Jika dilihat lebih mendalam, tingkat ketergantungan belanja daerah lebih dominan terhadap DAU daripada PAD. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah (BD), dan Flypaper effect*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang telah memporak-porandakan kehidupan bangsa Indonesia membawa hikmah akan kebutuhan reformasi total pada sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah menyangkut diberlakukannya otonomi daerah di tiap Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu campur tangan pemerintah pusat di masa lalu menyebabkan daerah mengalami stagnasi kreativitas dan terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki daerah, sehingga proses pembangunan dan kehidupan berdemokrasi di daerah tidak berjalan lancar.

Untuk mengatasi hal itu sejak tanggal 1 Januari 2001 otonomi daerah telah resmi diberlakukan di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Deddi Nordiawan, 2006).

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota utamanya dalam hal keuangannya karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota (Bambang Haryadi, 2002). Hal ini memang menjadi konsekuensi logis daerah otonomi daerah yakni pemerintah daerah harus lebih mandiri dari segala hal termasuk dari segi keuangan.

Landasan yuridis yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah telah diperbaharui sebanyak 2 kali. Pada awal diberlakukannya landasan yuridis yang mengatur adalah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Dan kini seiring dengan semakin berkembangnya otonomi daerah, Undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut. Pemerintah daerah juga

mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan Lain-lain Pendapatan.

Dalam penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik *et al* dalam Maimunah M, 2006).

Skripsi ini merupakan penelitian ulang (replikasi) dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jateng dan DIY)”. Penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi

belanja daerah, daya prediksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data dan sampel penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi dan periode yang digunakan adalah tahun 2002 – 2005, sehingga skripsi ini berjudul :

“ Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten /Kota Di Sulawesi) “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Pemerintah Daerah (BD) ?
2. Apakah DAU dan PAD dapat memprediksi Belanja Pemerintah Daerah (BD) ?
3. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris :

1. Pengaruh positif DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi
2. DAU dan PAD dapat memprediksi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi
3. Kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Bagi para aparat pemerintahan, penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.
2. Bagi peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini dapat menjadi referensi dan data tambahan.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang penggambaran teori yang melandasi penelitian ini meliputi; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, *flypaper effect*, hasil penelitian terdahulu, dan formulasi hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari populasi dan sample, data dan sumber data , variabel penelitian dan metode analisis data

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pembahasan secara rinci tentang analisis data serta pembahasan hasil yang diperoleh secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TERORI

Di era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah direalisasikan.

Untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat tersebut, daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam 1 (satu) periode. APBD memuat segala bentuk penerimaan dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter atau Rupiah. APBD seharusnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan suatu daerah namun di sisi lain juga tidak membebani secara berlebihan daerah yang bersangkutan. Untuk itu APBD harus disusun dengan memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, efektifitas (*value for money*).

Sumber-sumber penerimaan sebagaimana yang telah dijelaskan di UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu :
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - c. Dana Bagi Hasil
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah (belanja daerah) bahkan diharapkan tiap tahunnya akan selalu meningkat. Dan tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi.

Hal ini seperti yang tertuang di penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2002).

2.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dalam Sri Suranta dan Muhammad Syarifiqurrahman (2005) menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan

pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo dalam Sri Suranta dan Muhammad Syarifiqurrahman, 2005).

2.1.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan (Kesit Bambang Prakosa, 2003). Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintah daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

2.1.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.2 Dana Alokasi Umum

Menurut UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat ini sesungguhnya berasal dari dana yang

dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan (Sri Nawatmi, 2006).

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesejangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sementara alokasi dasar dihitung berdasar jumlah pegawai negeri sipil daerah. Proporsi dana alokasi umum antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbalanced kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyaluran dana alokasi umum

dilaksanakan tiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan.

2.3 Belanja Daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja aparatur daerah

Bagian belanja yang berupa : Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)

2. Belanja pelayanan publik

Bagian belanja yang berupa : Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)

3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Pengeluaran uang dengan kriteria :

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 - b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang diharapkan pada kegiatan investasi.
4. Belanja tidak tersangka.

Pengeluaran yang disediakan untuk :

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Namun pada praktiknya belanja pemerintah daerah dibagi dalam 2 bentuk seperti yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah, yakni sebagai berikut :

2.3.1 Belanja Rutin

Belanja yang wujudnya tidak berupa fisik dan terjadi secara terus menerus sepanjang periode anggaran. Sebagai contoh belanja gaji dan horarium pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan belanja lain-lain. Belanja rutin umumnya digunakan untuk membiayai operasional pemerintah daerah dan hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

2.3.2 Belanja Pembangunan

Selain dari belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja yang sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Belanja pembangunan ini pada akhirnya akan menghasilkan kapital publik dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh belanja untuk pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pembangunan jembatan dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.4 Penelitian terdahulu dan penarikan hipotesis

Penelitian tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) mengenai

“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jateng dan DIY)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2003) mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali)”. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara terpisah, dana alokasi umum dan pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan ataupun tanpa *lag*. Ketika tidak digunakan *lag*, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah lebih kuat dibandingkan dana alokasi umum. Tetapi dengan menggunakan *lag*, pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah justru lebih kuat dibandingkan pendapatan daerah.

Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Ketika kedua faktor (dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah) diregres secara serentak dengan belanja daerah, pengaruh keduanya juga signifikan baik dengan ataupun tanpa *lag*. Dalam model prediksi tanpa *lag*, daya prediksi dana alokasi

umum lebih rendah dari pada pendapatan asli daerah, tetapi sebaliknya dalam prediksi dengan *lag* daya prediksi dana alokasi umum lebih tinggi dari pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian terjadi *flypaper effect*.

2.4.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackly, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; Von Furnsternberg et al, 1986 dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim, 2003). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Furnsternberg et al, 1986 dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim, 2003). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Kesit Bambang Prakosa, 2004).

Di dalam konteks internasional beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah diantaranya Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover&Sheffrin, 1992 dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus pemerintah daerah di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras dan

Paraguay. Friedman dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004 menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan kenaikan belanja.

Hipotesis yang disusun untuk melihat pengaruh PAD terhadap BD adalah :

H1a : PAD_t berpengaruh positif terhadap BD_t

H1b : PAD_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_t

2.4.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Sebagian studi yang mempelajari pengaruh pendapatan dan belanja menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian studi lainya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan.

Penelitian yang dilakukan Holtz-Eakin (1985) dalam Mutiara Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah. Studi legrenzi & Milas (2001) dalam Mutiara Maimunah (2006) dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Penelitian Gamkhar & Oates (1996) dalam Kesit Bambang Prakosa (2004) memberikan analisa mengenai jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa

pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Berdasarkan konsep di atas maka hipotesis untuk dapat melihat pengaruh DAU tahun berjalan (DAU_t) terhadap belanja daerah tahun berjalan (BD_t) dapat dinyatakan sebagai berikut :

H2a : DAU_t berpengaruh positif terhadap BD_t

Sering terjadinya keterlambatan dalam penyampaian informasi mengenai besarnya jumlah DAU yang akan direalisasi mengakibatkan pemerintah daerah sering menggunakan dasar realisasi DAU tahun sebelumnya dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Seperti contoh pemerintah daerah Bekasi yang melakukan protes karena mereka hanya menerima DAU sebesar Rp 184,7 Miliar. Jumlah ini jauh dari perkiraan semula yang jumlahnya mencapai Rp 250 Miliar-Rp 800 Miliar. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat terlambat dalam menyampaikan informasi mengenai realisasi DAU sedangkan daerah sudah menyusun APBD. Dengan adanya kasus tersebut maka keputusan pemerintah daerah tentang belanja daerahnya sering menggunakan dasar DAU yang diterima tahun sebelumnya (Memen, 2001),

Studi Holtz-Eakin *et al* (1985) dalam Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003) menemukan bahwa transfer tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan. Hipotesis untuk dapat melihat

pengaruh DAU tahun lalu (DAU_{t-1}) terhadap belanja daerah tahun berjalan (BD_t) dapat dinyatakan sebagai berikut :

H2b : DAU_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_t .

2.4.3 *Flypaper Effect*

Dalam implementasi otonomi daerah, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah mengalami perbedaan dengan sebelum dilaksanakannya otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, sumber dana untuk pengeluaran daerah dapat diharapkan dari transfer pemerintah pusat kepada daerah atau dengan kata lain daerah mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Namun seiring dengan berjalannya otonomi daerah yang berarti juga bahwa daerah dituntut untuk dapat mandiri dengan cara memaksimalkan pendapatan asli daerah. Sehingga diharapkan dapat menutupi segala bentuk pengeluaran daerah.

Flypaper effect adalah suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari pada stimulus yang disebabkan oleh perubahan pendapatan daerah.

Studi Andersson (2002) dalam Kesit Bambang Prakosa (2004) tentang perubahan sistem *grants* terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Swedia menemukan bahwa kenaikan *non-matching grant* akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah daerah, berbeda dengan akibat dari kenaikan dalam pendapatan yang bersumber dari pajak. Kenaikan tarif pajak

tinggi menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Menurut Andersson, efek dari *non-matching grant* lebih besar dibandingkan dengan *matching grant* dan efek ini tergantung pada penurunan relatif atas *non-matching grant* untuk beberapa periode. Hasil ini memperlihatkan terjadinya *flypaper effect*.

Studi yang menemukan terjadinya *flypaper effect* juga dilakukan oleh Aaberge & Langorgen (1997) dalam Kesit Bambang Prakosa (2004). Studi ini menganalisis mengenai perilaku fiskal dan belanja pemda dengan *simultaneous setting* dan menemukan adanya *flypaper effect* dalam respon daerah terhadap perubahan pendapatan. Bagi pemda yang menjadi masalah dalam pembuatan keputusan alokasi sumber daya adalah pemilihan kombinasi terbaik antara pajak daerah, surplus dan defisit anggaran, dan output dalam pelayanan publik, yang dibatasi oleh aturan bahwa pengeluaran daerah plus surplus anggaran tidak melebihi *grants* dari pemerintah pusat plus pajak daerah. Dengan demikian dapat dilihat dampak antara *grants* dan pendapatan (pajak) daerah terhadap perilaku fiskal dan belanja daerah.

Dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis untuk melihat adanya *flypaper effect*, yaitu :

H3a : Pengaruh DAU_t terhadap BD_t lebih besar dari pada pengaruh PAD_t terhadap BD_t

H3b : Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar dari pada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di Sulawesi dan sampel yang digunakan adalah 45 Kabupaten/Kota di Sulawesi. Yang terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Gorontalo, 3 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara, 22 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Sulawesi Selatan, 7 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Sulawesi Tengah.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi tahun 2002-2005 yang berupa realisasi Belanja Daerah (BD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi yang diperoleh dari BPS Yogyakarta dan BPS DKI Jakarta.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel terikat (*Dependent Variabel*) dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah dan variabel bebas (*Independent Variabel*) adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2002).

3.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah merupakan salah satu bentuk dari Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat selain dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Propinsi.

3.3.3 Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja aparatur daerah

Bagian belanja yang berupa : Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)

b. Belanja pelayanan publik

Bagian belanja yang berupa : Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)

c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

d. Belanja tidak tersangka.

3.4 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana (simple regression) dan regresi berganda (multiple regression). Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh jumlah DAU dan PAD terhadap jumlah Belanja Daerah (BD) secara cross section dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_i = a + bx_i + e$$

Dimana:

Y_i : Jumlah Belanja atau perubahan dalam jumlah Belanja

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

x_1 : Jumlah DAU_t(DAU_{t-1}) atau PAD_t(PAD_{t-1})

e : Error term

Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah komponen-komponen pendapatan daerah tersebut secara serempak mempengaruhi Belanja Daerah. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_i = a + b_1X_{1i} + b_2X_{2i} + e$$

Keterangan :

Y_i : Jumlah Belanja

a : Konstanta

$b_1 b_2$: Koefisien Regresi

X_{1i} : DAU_t(DAU_{t-1})

X_{2i} : PAD_t(PAD_{t-1})

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi yang terdiri dari Yang terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Gorontalo, 3 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara, 22 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Sulawesi Selatan, 7 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Sulawesi Tengah. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 yang diperoleh dari BPS Yogyakarta dan BPS DKI Jakarta, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi. Dari hasil analisis data digunakan untuk membuktikan hipotesis satu hingga hipotesis ketiga.

Untuk membuktikan ketiga hipotesis yang diajukan, maka teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini analisis statistik digunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

4.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif
(dalam ribuan rupiah)

Descriptive Statistics			
	N	Minimum	Maximum
PAD	180	1073775.00	92308793.00
DAU	180	68120000.00	361340000.00
BD	180	33417808.00	623210133.00
Valid N (listwise)	180		

Sumber : Data sekunder diolah, 2007

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah Kabupaten yang menjadi sampel adalah 45 Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi. Nilai dana alokasi umum (DAU) tertinggi adalah di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp 361.360.000.000. Nilai DAU terendah adalah di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 68.120.000.000.

Nilai PAD tertinggi adalah di Kota Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 92.308.793.000 dan nilai PAD terendah adalah di Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp 1.073.775.000.

Belanja Daerah tertinggi adalah di Kota Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp.623.210.133.000. Sedangkan Belanja Daerah terendah adalah di Kota Palu Sulawesi Tengah pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp.33.417.808.000.

4.2 Analisis Statistik

Analisis statistik merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Analisis ini terbagi menjadi 2 yaitu Analisis Regresi Sederhana dan Analisis Regresi Berganda.

4.2.1 Analisis Pengaruh PAD_t dan DAU_t tahun berjalan terhadap BD_t

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing DAU dan PAD pada tahun berjalan terhadap BD tahun berjalan. Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (*soft were*) komputer yaitu program SPSS 11.5.

Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut..

Tabel 4.2

Analisis Pengaruh PAD_t dan DAU_t terhadap BD_t

<i>Dependent Variabel</i>	<i>Independent Variabel</i>	konstanta	b	Adj R Square	t test	F test	p-value
<i>Belanja Daerah tahun berjalan (BD_t)</i>	<i>PAD tahun berjalan (PAD_t)</i>	159546438,269	4,968	0,492	13,202	174,302	0,000
<i>Belanja Daerah tahun berjalan (BD_t)</i>	<i>DAU tahun berjalan (DAU_t)</i>	-11259257,925	1,450	0,706	20,732	429,826	0,000

Sumber : Data sekunder diolah, 2007

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_t = a + b_1 X_t + e$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi sederhana maka didapat persamaan tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap BD di Sulawesi sebagai berikut :

$$BD_t = 159546438,269 + 4,968 PAD_t \dots\dots\dots 1$$

$$BD_t = -11259257,925 + 1,450 DAU_t \dots\dots\dots 2$$

Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 159546438,269 menunjukkan jika tidak ada pendapatan asli daerah maka besarnya belanja daerah akan sama dengan konstantanya yaitu sebesar Rp. 159.546.438,269, dan konstanta sebesar -11259257,925 menunjukkan jika

tidak ada dana alokasi umum maka belanja daerah akan negative/turun sebesar Rp. 11.259.257,925.

Koefisien regresi PAD t sebesar 4,968, berarti jika PAD mengalami peningkatan sebesar 1 % maka BD akan meningkat sebesar 4,968% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Sedangkan koefisien regresi sebesar 1,450 menunjukkan bahwa jika DAU dari pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 1% maka BD di Kabupaten/Kota di Sulawesi akan meningkat sebesar 1,45% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi seperti pada tabel 4.2. diatas menunjukkan bahwa untuk PAD_t (tahun berjalan) diperoleh t statistik sebesar 13,202 dan F hitung sebesar 174,302 dengan *p-value* sebesar 0,000 yang nilainya jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yakni 0,05, maka H_{1a} diterima, yang berarti PAD_t berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD_t . Hal ini berarti semakin tinggi PAD_t maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Dengan demikian hipotesis alternatif pertama (H_{1a}) dalam penelitian ini dapat diterima. Sedangkan besarnya pengaruh PAD_t terhadap BD_t ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,492 atau sebesar 49,2%. Hal ini berarti belanja daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi 49,2% dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah tahun berjalan dan 50,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk DAU_t diperoleh t statistik sebesar 20,732 dan F test sebesar 429,826 dengan *p-value* sebesar

0,000 yang nilainya dibawah tingkat signifikansi yakni 0,05, maka H1b diterima, yang berarti DAU_t berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD_t . Hal ini berarti semakin tinggi DAU_t dari pemerintah pusat maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Dengan demikian hipotesis alternatif kedua (H1b) dalam penelitian ini dapat diterima. Sedangkan besarnya pengaruh DAU_t terhadap belanja daerah tahun berjalan ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,706 atau sebesar 70,6%. Hal ini berarti belanja daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi 70,6% dapat dijelaskan oleh dana alokasi umum tahun berjalan dan sisanya (29,4%) dipengaruhi oleh variabel lain.

Dari hasil analisis secara parsial dengan analisis regresi sederhana, selanjutnya dilakukan uji secara serentak dengan uji regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap BD tahun berjalan, dan hasil selengkapnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3.

Analisis Pengaruh PAD_t dan DAU_t terhadap BD_t

Model	Koefisien	t statistik	Sig-t	F Statistik	Sig F	Adj. Rsquare
(Constant)	10472048.712			338.735	0.000	0.791
$PAD(t)$	2.465	8.557	0.000			
$DAU(t)$	1.122	15.960	0.000			

Untuk mengetahui pengaruh secara serentak DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t digunakan uji F. Dari tabel 4.3 tersebut, menunjukkan bahwa nilai F statistiknya 338,735 dan Adjusted R Square sebesar 0,791 artinya 79,1% kedua variabel (PAD dan DAU) secara bersama-sama dapat menjelaskan model dari penelitian ini dan sisanya sebesar 28,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU pada tahun berjalan bersama-sama berpengaruh secara signifikan (0,000) terhadap BD tahun berjalan.

Sedangkan untuk melihat variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap BD , maka dibandingkan nilai t statistiknya kedua variabel tersebut ketika diregresikan secara parsial dengan ketika diregresikan secara serentak.

Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Analisis Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD

Variabel	Reg-Partial t statistik	Adj. Rsquare	Reg-Serentak t statistik
1. PAD_t	13.202	0,492	8.557
2. DAU_t	20.732	0,706	15.960

Hasil uji t statistik dari regresi parsial dan regresi serentak menunjukkan bahwa untuk DAU selalu konsisten memiliki nilai yang paling besar yaitu sebesar 20,732 pada regresi parsial dan 15,960 pada regresi serentak. Hasil ini juga didukung dengan koefisien determinasi (Adj R

Square) secara parsial, dimana pengaruh DAU_t lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD_t terhadap BD_t ($70,6\% > 49,2\%$). Dengan demikian pengaruh DAU_t terhadap BD_t secara signifikan lebih kuat dibandingkan dengan PAD_t . Dengan demikian hipotesis H3a yang menyatakan “pengaruh DAU_t terhadap BD_t lebih besar dari pada pengaruh PAD_t terhadap BD_t ” dapat diterima.

4.2.2 Analisis Pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap BD_t

Pada analisis ini dilakukan dengan meregresikan variabel PAD dan DAU terhadap BD pada lag 1. Hal ini dilakukan dengan menggeser pada periode 1 tahun sebelumnya untuk variabel independent (2002 – 2004), sedangkan data pada variabel dependent merupakan data tahun berjalan yaitu dengan periode 2003 – 2005, atau terjadi *lag* 1 tahun antara data *variable independent* dengan *variable dependent*.

Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut..

Tabel 4.5
Analisis Pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap BD_t

<i>Dependent</i> <i>Variabel</i>	<i>Independent</i> <i>Variabel</i>	konstanta	b	Adj R Square	t test	F test	p- value
<i>Belanja Daerah tahun berjalan (BD_t)</i>	<i>PAD tahun lalu (PAD_{t-1})</i>	173553113,232	5,253	0,464	10,813	116,912	0,000
<i>Belanja Daerah tahun berjalan (BD_t)</i>	<i>DAU tahun lalu (DAU_{t-1})</i>	32611543,669	1,282	0,559	13,071	170,841	0,000

Sumber : Data sekunder diolah, 2007

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_t = a + b_1 X_{t-1} + e$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan tentang pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap BD_t di Sulawesi sebagai berikut :

$$BD_t = 173553113.232 + 5.253DAU_{t-1} \dots\dots\dots 3$$

$$BD_t = 32611543.669 + 1.282 PAD_{t-1} \dots\dots\dots 4$$

Dari persamaan 3 dan persamaan 4 dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 173553113.232 berarti bahwa jika tidak ada DAU_{t-1} maka besarnya BD_t akan sama dengan konstantanya yaitu sebesar Rp 173553113.232 dan konstanta sebesar 32611543.669 berarti jika tidak ada

PAD_{t-1} maka BD_t akan sebesar Rp 32611543.669.

Koefisien regresi PAD_{t-1} sebesar 5,253, berarti jika PAD_{t-1} mengalami peningkatan sebesar 1 % maka BD_t akan meningkat sebesar 5,253% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Sedangkan koefisien regresi DAU_{t-1} sebesar 1,282 menunjukkan bahwa jika DAU_{t-1} dari pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 1% maka BD_t di Kabupaten/Kota di Sulawesi akan meningkat sebesar 1,282% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi seperti pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa untuk PAD_{t-1} diperoleh t statistik sebesar 10,813 dan F hitung sebesar 116,912 dengan *p-value* sebesar 0,000 yang nilainya jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditolerir yakni 0,05, maka H_{1b} diterima, yang berarti PAD_{t-1} berpengaruh secara positif terhadap BD_t . Hal ini berarti semakin tinggi PAD_t maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Sedangkan besarnya pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,464 atau sebesar 46,4%. Hal ini berarti BD_t di Kabupaten/Kota di Sulawesi 46,4% dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah tahun lalu (PAD_{t-1}).

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk DAU_{t-1} diperoleh t statistik sebesar 13,071 dan F test sebesar 170,841 dengan *p-value* sebesar 0,000 yang nilainya jauh dibawah taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, maka H_{2b} diterima, yang berarti DAU_{t-1} berpengaruh secara positif terhadap BD_t tahun berjalan. Hal ini berarti semakin tinggi DAU_{t-1} dari pemerintah pusat

maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Sedangkan besarnya pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,559 atau sebesar 55,9%. Hal ini berarti BD_t di Kabupaten/Kota di Sulawesi 55,9% dapat dijelaskan oleh DAU_{t-1} .

Sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t , dan hasil selengkapnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Analisis Pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap BD_t

Model	Koefisien	t statistik	Sig-t	F Statistik	Sig F	Adj. Rsquare
(Constant)	51541435.336			144.460	0.000	0.682
$PAD_{(t-1)}$	3.140	7.228	0.000			
$DAU_{(t-1)}$	0.928	9.592	0.000			

Dari tabel 4.6 tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistiknya 144,460 dan Adjusted R Square sebesar 0,682 artinya 68,2% kedua variabel (PAD dan DAU) pada tahun lalu secara bersama-sama dapat menjelaskan model dari penelitian ini adalah sebesar 68,2% dan sisanya sebesar 31,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU pada tahun lalu bersama-sama berpengaruh secara signifikan dengan *p-value* sebesar 0,000 terhadap BD_t .

Untuk melihat variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap BD_t , maka dibandingkan nilai t statistiknya kedua variabel tersebut ketika diregresikan secara parsial dengan ketika diregresikan secara serentak.

Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7

Analisis Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD_t

Variabel	Reg-Partial t statistik	Adj. R Square	Reg-Serentak t statistik
1. PAD_{t-1}	10.813	0.464	7.228
2. DAU_{t-1}	13.071	0.559	9.592

Hasil uji t statistik dari regresi parsial ke regresi serentak menunjukkan bahwa DAU_{t-1} memiliki pengaruh yang signifikan lebih kuat dibandingkan pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t . Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial maupun secara serentak, dengan t hitung selalu lebih besar. Hal ini juga didukung dengan nilai koefisien determinasi dimana pengaruh DAU_{t-1} lebih besar dibandingkan PAD_{t-1} . Dengan demikian hipotesis H3b yang “pengaruh DAU_{t-1} tahun lalu terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t ” dapat diterima.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pembahasan Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “ PAD_t berpengaruh positif terhadap BD_t dan PAD_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_t ”. Hasil pengujian hipotesis pertama, telah membuktikan bahwa PAD_t maupun PAD_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_t . Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2002). Belanja daerah adalah segala bentuk kewajiban daerah selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Tersangka. Jadi semakin besar pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah.

4.3.2 Pembahasan Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa “ DAU_t berpengaruh positif terhadap BD_t dan DAU_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_{t-1} ”. Dari hasil analisis menemukan bahwa DAU_t berpengaruh secara positif berpengaruh terhadap BD_t . Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa DAU_{t-1} berpengaruh secara positif terhadap BD_t . hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Holtz-Eakin (1985) dalam Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah. Studi Legrenzi & Milas (2001) dalam Mutiara Maimunah (2006) dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hal ini disebabkan karena dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan transfer dana adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Holtz-Eakin (1985) dalam Mutiara Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat

keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah. Penelitian Gamkhar&Oates (1996) Kesit Bambang Prakosa (2004) mengenai respon Pemerintah daerah terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991 menyebutkan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Seiring dengan masih seringnya terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi mengenai informasi mengenai besarnya jumlah DAU yang akan direalisasi mengakibatkan pemerintah daerah sering menggunakan dasar realisasi DAU tahun sebelumnya dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

4.3.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga

Sedangkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh DAU tahun berjalan maupun DAU tahun lalu mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD tahun berjalan maupun PAD tahun lalu terhadap belanja daerah tahun berjalan. Hal ini berarti ditemukan *flypaper effect*, artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menemukan bahwa dalam model prediksi BD, daya prediksi DAU terhadap BD tetap lebih tinggi dibandingkan dengan daya

prediksi PAD, dan hal tersebut telah menunjukkan terjadinya *Flypaper Effect*. *Flypaper-effect* dipandang sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga semestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula (Hines & Thaler, 1995; dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004).

Kondisi *flypaper effect* jelas merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Padahal cita-cita utama otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat seperti masa sebelum otonomi daerah belum diberlakukan. Hal ini baru dapat teratasi apabila daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastrukturnya sehingga dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) tahun berjalan. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang diperoleh dari pajak, retribusi, laba usaha daerah serta pendapatan lain-lain yang sah maka semakin besar Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Begitu juga dengan PAD pada tahun lalu juga terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD tahun berjalan. Artinya semakin besar PAD tahun lalu maka semakin besar pula BD tahun berjalan Kabupaten/Kota di Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di Pulau Sulawesi masih sangat bergantung kepada besarnya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan oleh pemerintah daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) tahun berjalan. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin besar Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Begitu juga dengan DAU pada tahun lalu juga terbukti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) tahun berjalan. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang diperoleh dari pajak, retribusi, laba usaha daerah serta pendapatan lain-lain yang sah maka semakin besar Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Begitu juga dengan PAD pada tahun lalu juga terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD tahun berjalan. Artinya semakin besar PAD tahun lalu maka semakin besar pula BD tahun berjalan Kabupaten/Kota di Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di Pulau Sulawesi masih sangat bergantung kepada besarnya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan oleh pemerintah daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) tahun berjalan. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin besar Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Begitu juga dengan DAU pada tahun lalu juga terbukti

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD tahun berjalan. Artinya semakin besar DAU tahun lalu yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin besar pula BD tahun berjalan Kabupaten/Kota di Sulawesi.

3. Dalam model prediksi BD tahun berjalan, daya prediksi DAU tahun berjalan lebih tinggi dibandingkan dengan PAD tahun berjalan. Begitu juga dengan DAU tahun lalu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh PAD tahun lalu terhadap BD tahun berjalan. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD. Hal ini juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah akan dana alokasi umum yang ditransfer dari pemerintah pusat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Karena studi ini belum mencakup aspek-aspek lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya aspek kebijakan publik, aspek politik, aspek manajemen keuangan, aspek penganggaran daerah, dan aspek psikologis personalitas pembuat keputusan pemerintah daerah.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah belum dianalisisnya efek industri yang kemungkinan juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli masing-masing daerah. Sumbangan yang diberikan oleh sektor industri terhadap pendapatan daerah di tiap-tiap daerah tentunya berbeda-beda.

Penelitian ini juga hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Sulawesi dan data yang digunakan adalah data untuk 4 tahun yaitu tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 sehingga jika digunakan untuk melihat kondisi secara umum di Indonesia belum cukup memadai. Untuk itu pada penelitian-penelitian sesudahnya perlu adanya penambahan data baik untuk jumlah kurun waktu maupun jumlah daerah.

5.3 Saran

1. Bagi pemerintah daerah agar dapat berusaha untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan asli daerah misalnya dengan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas ataupun dengan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola/bekerjasama dengan pihak-pihak yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengimbangi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.
2. Bagi pemerintah pusat sebaiknya dalam menyampaikan APBN tentang DAU jauh sebelum tahun anggaran berjalan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan lebih baik. Daerah akan lebih siap menaksir

jumlah belanja tahun berjalan, serta kebijakan pajak dan retribusi daerah apabila masih terdapat *gap* antara DAU dan PAD.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel yang digunakan agar dapat dibandingkan bagaimana kondisi di daerah yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda. Selain itu peneliti bisa memasukkan unsur-unsur pendukung pendapatan asli daerah, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Potensi dua hal ini di tiap-tiap daerah tentunya berbeda-beda sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor apa yang lebih berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah, apakah tingkat kualitas sumber daya manusia atau kekayaan sumber daya alam atau keduanya mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali", *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya, 16-17 Oktober, 2003.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2003*, BPS, Jakarta, 2004.
- _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2003-2004*, BPS, Jakarta, 2005.
- _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2004-2005*, BPS, Jakarta, 2006.
- Haryadi, Bambang, "Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur)", *Simposium Nasional Akuntansi V*, Semarang, 5-6 September, 2002.
- Kustiawan, Memen, "Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat)", *Simposium Nasional Akuntansi IV*, 2001.
- Maimunah, Mutiara, "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera", *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Nawatmi, Sri, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 13 No 2*, September, 2006.
- Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2006

Prakosa, Kesit Bambang, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah ; Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY", *JAAI Vol 08 No 2*, Desember, 2004.

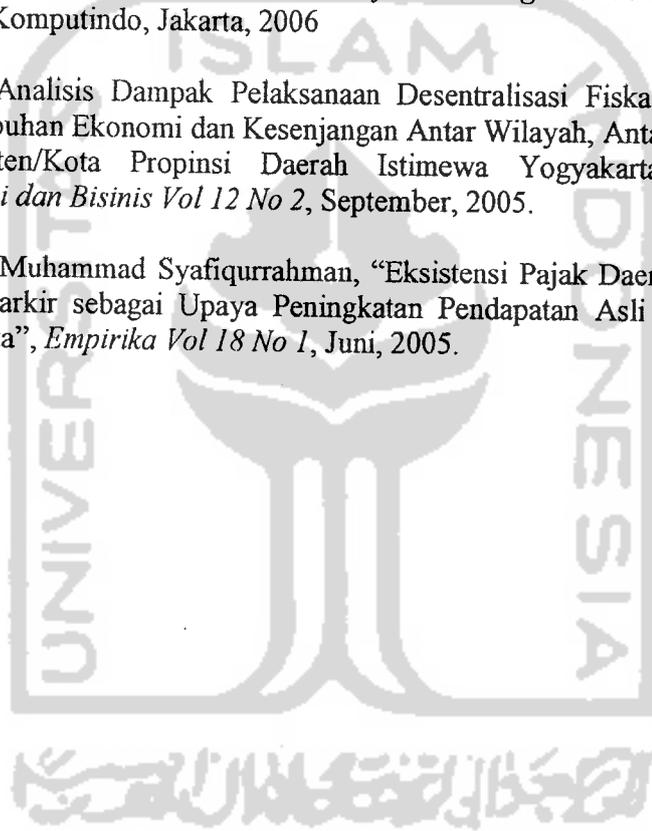
_____, "Pajak dan Retribusi Daerah", UII Press, Yogyakarta, 2003.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Daerah (Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004)*, Media Abadi, Yogyakarta, 2005.

Santosa, Singgih, *Menguasai Statistik di Era Reformasi dengan SPSS 14*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006

Sasana, Hadi, "Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, Antar Sektor di Kabupaten/Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 12 No 2*, September, 2005.

Suranta, Sri dan Muhammad Syafiqurrahman, "Eksistensi Pajak Daerah melalui Pajak Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Surakarta", *Empirika Vol 18 No 1*, Juni, 2005.



LAMPIRAN 1

RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI

TAHUN ANGGARAN

2002-2005

(000 Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005
Propinsi Sulawesi Tenggara					
1	Kab Buton	6,026,715	11,148,035	7,261,645	6,661,350
2	Kab Muna	12,387,473	20,980,050	21,511,781	26,001,185
3	Kab Kendari	8,645,892	8,069,345	7,417,633	7,951,898
4	Kab Kolaka	16,910,500	17,574,071	10,127,812	11,158,996
5	Kota Kendari	9,643,250	13,893,277	14,112,540	14,836,972
Propinsi Gorontalo					
1	Kab Boalemo	8,618,030	11,336,550	4,351,250	4,578,900
2	Kab Gorontalo	7,030,084	18,212,470	12,060,417	19,606,667
3	Kota Gorontalo	8,253,900	12,107,064	16,589,990	20,207,400
Propinsi Sulawesi Utara					
1	Kab Bolang Mongondow	7,392,358	10,465,890	8,822,095	8,089,450
2	Kab Minahasa	9,796,486	13,534,479	13,630,200	10,986,560
3	Kab Sangihe Talaud	8,672,223	8,746,662	7,836,090	11,598,820
4	Kota Manado	30,087,134	30,392,110	34,576,450	37,500,000
5	Kota Bitung	12,003,111	5,803,320	9,444,723	10,044,820
Propinsi Sulawesi Tengah					
1	Kab Banggai Kepulauan	1,073,775	4,116,485	4,436,450	3,786,900
2	Kab Banggai	5,520,000	8,457,618	7,421,869	9,290,217
3	Kab Morowali	3,270,000	3,631,296	3,067,824	2,748,552
4	Kab Poso	3,897,397	6,419,508	5,722,067	6,241,347
5	Kab Donggala	5,973,818	9,450,778	9,400,827	9,922,096
6	Kab Toli-toli	11,320,479	4,498,617	4,758,450	7,502,365
7	Kab Buol	3,691,688	5,156,729	5,061,093	3,541,258
8	Kota Palu	13,678,908	15,638,397	19,461,021	18,796,762

Propinsi Sulawesi Selatan					
1	Kab Selayar	4,062,560	4,119,793	3,810,768	6,315,160
2	Kab Bulukumba	10,616,265	10,692,440	9,973,018	12,450,725
3	Kab Bantaeng	4,129,532	7,271,770	4,954,002	8,280,959
4	Kab Janeponto	4,062,745	4,587,694	5,096,115	8,966,351
5	Kab Takalar	5,963,883	4,958,693	5,225,247	8,847,091
6	Kab Gowa	12,542,516	21,865,206	19,973,126	33,036,625
7	Kab Sinjai	5,828,445	8,900,057	12,037,784	14,328,674
8	Kab Maros	11,728,587	10,264,638	11,950,494	17,140,925
9	Kab Pangkajene Kepulauan	15,757,950	25,075,196	26,904,297	26,611,707
10	Kab Barru	4,510,688	8,824,883	9,960,613	10,096,718
11	Kab Bone	12,056,016	15,945,552	17,782,183	18,572,234
12	Kan Soppeng	6,138,827	9,031,189	6,321,168	7,064,292
13	Kab Wajo	15,517,797	14,788,533	13,855,862	17,403,795
14	Kab Sindenreng Rappang	9,413,421	12,603,155	13,522,455	13,522,454
15	Kab Pinrang	5,884,125	14,754,561	9,233,440	13,128,875
16	Kab Enrekang	4,212,300	10,641,415	12,278,940	9,957,810
17	Kab Luwu	13,575,424	7,284,883	13,997,350	13,535,909
18	Kab Tana Toraja	11,568,091	13,989,349	12,192,717	18,677,240
19	Kab Polowali Mamasa	5,391,598	6,800,960	10,779,717	13,160,463
20	Kab Mejene	2,345,329	3,226,794	2,743,726	3,637,246
21	Kab Mamuju	6,525,236	7,947,113	5,791,043	9,297,965
22	Kan Luwu Utara	28,433,373	23,828,812	10,010,744	12,807,239
23	Kota Ujung Pandang	53,409,452	78,684,690	85,704,918	92,308,793
24	Kota Pare-pare	8,848,386	15,205,651	15,423,289	17,087,359

LAMPIRAN 2

RINGKASAN REALISASI DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI

TAHUN ANGGARAN

2002-2005

(000 Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005
Propinsi Sulawesi Tenggara					
1	Kab Buton	188,540,000	215,780,000	134,207,000	134,207,000
2	Kab Muna	171,370,000	186,900,000	191,451,000	205,104,000
3	Kab Kendari	225,320,000	258,230,000	174,747,800	185,291,000
4	Kab Kolaka	159,350,001	180,760,000	194,922,000	154,950,000
5	Kota Kendari	111,580,000	140,329,550	145,149,750	152,933,000
Propinsi Gorontalo					
1	Kab Boalemo	105,070,000	128,625,070	68,120,000	73,286,000
2	Kab Gorontalo	190,200,000	232,088,340	170,681,000	181,354,000
3	Kota Gorontalo	110,210,000	124,005,000	135,079,300	138,105,000
Propinsi Sulawesi Utara					
1	Kab Bolang Mongondow	174,900,000	213,620,000	219,319,000	239,965,000
2	Kab Minahasa	315,000,000	361,340,000	210,510,000	141,308,000
3	Kab Sangihe Talaud	155,970,000	113,480,000	141,699,000	182,540,000
4	Kota Manado	144,240,000	194,620,420	183,903,000	201,530,000
5	Kota Bitung	105,300,000	123,941,590	119,755,000	131,493,000
Propinsi Sulawesi Tengah					
1	Kab Banggai Kep	91,640,000	123,499,339	135,070,463	135,630,000
2	Kab Banggai Kep	153,860,000	176,730,000	185,949,686	197,394,000
3	Kab Morowali	126,060,000	143,050,000	149,256,760	166,950,000
4	Kab Poso	200,420,100	201,950,000	206,871,000	156,061,000
5	Kab Donggala	272,549,387	202,834,318	227,232,345	238,354,000
6	Kab Toli-toli	112,270,000	129,650,000	136,256,000	145,171,000
7	Kab Buol	90,310,000	110,663,387	112,587,000	124,527,000
8	Kota Palu	139,740,000	176,989,109	174,264,256	171,947,000

Propinsi Sulawesi Selatan					
1	Kab Selayar	92,480,000	105,300,000	108,368,000	119,057,000
2	Kab Bulukumba	149,790,000	184,304,340	179,259,000	191,275,000
3	Kab Bantaeng	92,700,000	106,330,000	109,468,000	122,487,000
4	Kab Janeponto	87,403,372	141,780,000	146,600,000	171,099,690
5	Kab Takalar	119,100,000	136,890,000	138,354,000	149,184,000
6	Kab Gowa	173,910,000	202,110,000	225,980,477	235,850,000
7	Kab Sinjai	112,850,000	132,820,000	137,118,000	145,522,000
8	Kab Maros	130,100,000	148,212,727	161,734,044	165,016,000
9	Kab Pangkajene Kep	125,620,000	151,260,000	154,392,000	164,764,000
10	Kab Barru	108,450,000	120,810,000	125,409,000	137,899,000
11	Kab Bone	214,620,000	257,081,144	265,708,196	276,736,000
12	Kan Soppeng	130,065,000	147,030,000	151,053,590	164,543,000
13	Kab Wajo	139,920,000	166,130,000	166,130,000	173,212,000
14	Kab Sindenreng Rappang	122,190,000	147,830,000	147,830,000	147,830,000
15	Kab Pinrang	136,170,000	164,013,247	165,988,057	165,704,000
16	Kab Enrekang	105,300,000	125,877,388	131,060,000	140,058,000
17	Kab Luwu	172,720,000	141,540,000	168,609,000	168,609,000
18	Kab Tana Toraja	171,710,000	196,790,000	201,814,000	212,603,000
19	Kab Polowali Mamasa	158,630,000	124,140,000	152,051,000	181,737,000
20	Kab Mejene	101,690,000	115,670,000	116,114,000	124,600,000
21	Kab Mamuju	157,520,000	171,940,833	122,109,167	150,289,000
22	Kan Luwu Utara	139,790,000	175,210,000	107,732,000	123,780,000
23	Kota Ujung Pandang	275,050,000	308,140,000	308,158,000	323,075,000
24	Kota Pare-pare	92,740,000	116,320,000	121,837,000	124,411,000

LAMPIRAN 3
RINGKASAN REALISASI BELANJA DAERAH (BD)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI
TAHUN ANGGARAN
2002-2005

(000 Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005
Propinsi Sulawesi Tenggara					
1	Kab Buton	210,505,008	305,349,809	223,453,105	312,107,241
2	Kab Muna	194,479,928	274,200,456	265,960,902	293,334,119
3	Kab Kendari	246,958,507	315,773,235	243,906,050	286,862,600
4	Kab Kolaka	192,077,409	249,971,921	275,478,818	234,881,816
5	Kota Kendari	145,761,849	208,607,613	219,585,724	227,520,690
Propinsi Gorontalo					
1	Kab Boalemo	127,923,605	172,328,642	120,513,140	123,721,260
2	Kab Gorontalo	207,252,409	302,632,910	238,345,460	264,172,992
3	Kota Gorontalo	127,572,322	185,828,170	204,312,080	208,196,315
Propinsi Sulawesi Utara					
1	Kab Bolang Mongondow	212,336,719	277,042,293	298,508,164	303,461,780
2	Kab Minahasa	342,174,430	473,005,587	324,747,570	274,111,980
3	Kab Sangihe Talaud	175,393,140	142,512,203	183,760,888	251,889,790
4	Kota Manado	194,930,924	266,790,390	285,142,970	291,457,651
5	Kota Bitung	132,151,565	151,058,040	157,792,581	170,176,372
Propinsi Sulawesi Tengah					
1	Kab Banggai Kep	97,739,760	166,148,251	194,135,509	194,178,885
2	Kab Banggai	171,430,000	249,433,509	236,896,309	257,596,130
3	Kab Morowali	146,770,000	170,637,649	203,437,502	215,259,825
4	Kab Poso	238,173,643	287,862,389	292,035,534	221,308,721
5	Kab Donggala	295,751,989	263,775,900	293,071,084	322,461,679
6	Kab Toli-toli	139,634,497	181,205,955	175,938,886	192,670,004
7	Kab Buol	105,812,917	141,804,671	166,523,607	183,527,061
8	Kota Palu	172,614,082	33,417,808	250,192,928	539,114,004

Propinsi Sulawesi Selatan					
1	Kab Selayar	110,854,664	134,177,778	151,776,027	166,611,736
2	Kab Bulukumba	180,304,582	227,460,239	236,064,001	252,635,838
3	Kab Bantaeng	108,785,893	146,080,006	155,767,109	178,687,570
4	Kab Janeponto	108,853,904	188,560,540	186,924,521	217,360,486
5	Kab Takalar	146,039,748	183,050,495	202,915,209	202,581,392
6	Kab Gowa	217,996,397	273,572,759	286,676,135	321,487,289
7	Kab Sinjai	128,497,562	188,219,058	191,802,520	201,140,829
8	Kab Maros	199,786,517	201,084,067	221,080,279	239,689,325
9	Kab Pangkajene Kep	160,834,160	221,915,177	231,999,216	246,876,150
10	Kab Barru	127,843,449	180,571,321	218,165,220	212,195,650
11	Kab Bone	247,475,729	366,021,793	388,273,887	394,002,762
12	Kan Soppeng	144,175,817	191,851,994	197,736,434	219,903,899
13	Kab Wajo	172,425,582	241,117,993	261,522,960	292,301,649
14	Kab Sindenreng Rappang	147,819,837	211,258,413	242,832,150	242,857,932
15	Kab Pinrang	165,612,588	216,939,956	214,790,690	229,334,690
16	Kab Enrekang	129,457,733	191,709,355	202,399,070	209,306,340
17	Kab Luwu	208,412,038	206,201,919	236,915,994	240,331,360
18	Kab Tana Toraja	195,334,165	255,729,660	69,164,102	290,103,844
19	Kab Polowali Mamasa	193,366,830	190,235,025	217,182,068	254,588,298
20	Kab Mejene	125,986,568	149,156,488	155,236,115	167,188,181
21	Kab Mamuju	230,328,321	236,097,558	176,611,622	211,675,350
22	Kan Luwu Utara	234,080,240	287,802,416	159,397,837	182,771,236
23	Kota Ujung Pandang	421,322,408	565,782,563	623,210,133	614,482,884
24	Kota Pare-pare	113,093,845	172,676,640	190,257,098	179,702,539

LAMPIRAN 4

ANALISIS REGRESI SEDERHANA PENGARUH PADt TERHADAP BJDt

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD t	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BJD t

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.495	.492	60453129.1

a. Predictors: (Constant), PAD t

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.37E+17	1	6.370E+17	174.302	.000 ^a
	Residual	6.51E+17	178	3.655E+15		
	Total	1.29E+18	179			

a. Predictors: (Constant), PAD t

b. Dependent Variable: BJD t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.6E+08	6530329		24.432	.000
	PAD t	4.968	.376	.703	13.202	.000

a. Dependent Variable: BJD t

LAMPIRAN 5

ANALISIS REGRESI SEDERHANA PENGARUH DAU_t TERHADAP BDU_t

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU _t	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BDU_t

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841 ^a	.707	.706	46024254.6

a. Predictors: (Constant), DAU_t

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.10E+17	1	9.105E+17	429.826	.000 ^a
	Residual	3.77E+17	178	2.118E+15		
	Total	1.29E+18	179			

a. Predictors: (Constant), DAU_t

b. Dependent Variable: BDU_t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.1E+07	1.2E+07		-.957	.340
	DAU _t	1.450	.070	.841	20.732	.000

a. Dependent Variable: BDU_t

LAMPIRAN 6

**ANALISIS REGRESI BERGANDA PENGARUH PAD_t dan DAU_t
TERHADAP BD_t**

Regression**Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU _t , PAD _t	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BJD_t**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.793	.791	38817517.5

a. Predictors: (Constant), DAU_t, PAD_t**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.02E+18	2	5.104E+17	338.735	.000 ^a
	Residual	2.67E+17	177	1.507E+15		
	Total	1.29E+18	179			

a. Predictors: (Constant), DAU_t, PAD_tb. Dependent Variable: BJD_t**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.0E+07	1.0E+07		1.023	.308
	PAD _t	2.465	.288	.349	8.557	.000
	DAU _t	1.122	.070	.651	15.960	.000

a. Dependent Variable: BJD_t

LAMPIRAN 7

ANALISIS REGRESI SEDERHANA PENGARUH PAD_{t-1} TERHADAP BJD_t

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD t-1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BJD t

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.684 ^a	.468	.464	63285434.2

a. Predictors: (Constant), PAD t-1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.68E+17	1	4.682E+17	116.912	.000 ^a
	Residual	5.33E+17	133	4.005E+15		
	Total	1.00E+18	134			

a. Predictors: (Constant), PAD t-1

b. Dependent Variable: BJD t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.7E+08	7936114		21.869	.000
	PAD t-1	5.253	.486	.684	10.813	.000

a. Dependent Variable: BJD t

LAMPIRAN 8

ANALISIS REGRESI SEDERHANA PENGARUH DAU_{t-1} TERHADAP BDt

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU t-1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BJD t

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.562	.559	57395035.0

a. Predictors: (Constant), DAU t-1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.63E+17	1	5.628E+17	170.841	.000 ^a
	Residual	4.38E+17	133	3.294E+15		
	Total	1.00E+18	134			

a. Predictors: (Constant), DAU t-1

b. Dependent Variable: BJD t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.3E+07	1.6E+07		1.998	.048
	DAU t-1	1.282	.098	.750	13.071	.000

a. Dependent Variable: BJD t

LAMPIRAN 9

ANALISIS REGRESI BERGANDA PENGARUH PAD_{t-1} dan DAU_{t-1}

TERHADAP BDT

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU t-1 PAD t-1	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BJD t

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 ^a	.686	.682	48763883.7

a. Predictors: (Constant), DAU t-1, PAD t-1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.87E+17	2	3.435E+17	144.460	.000 ^a
	Residual	3.14E+17	132	2.378E+15		
	Total	1.00E+18	134			

a. Predictors: (Constant), DAU t-1, PAD t-1

b. Dependent Variable: BJD t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.2E+07	1.4E+07		3.652	.000
	PAD t-1	3.140	.434	.409	7.228	.000
	DAU t-1	.928	.097	.542	9.592	.000

a. Dependent Variable: BJD t